

Katalog BPS: 2109.3500

Statistik Potensi Desa

*Laporan Eksekutif*

# Statistik Potensi Desa Propinsi Jawa Timur Tahun 2000



Statistik Potensi Desa 2000

**BPS**

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROPINSI JAWA TIMUR**

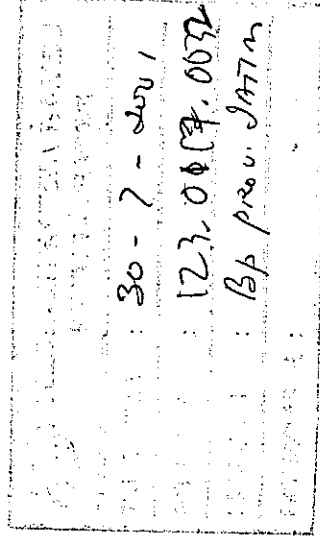
## KATA PENGANTAR

Laporan eksekutif Potensi desa Tahun 2000 ini merupakan salah satu output dari pelaksanaan survei Podes yang dilakukan pada tahun 1999 pada seluruh desa di Jawa Timur.

Publikasi tersebut hanya memuat hal-hal pokok saja mengenai keadaan kependudukan, perumahan dan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, perhubungan dan keamanan. Dimana informasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan dilengkapi dengan ulasan ringkas.

Diharapkan publikasi ini dapat mempermudah para pengguna data dalam memperoleh informasi penting secara cepat khususnya bagi para eksekutif yang umumnya memiliki waktu yang terbatas dalam mengkaji data-data yang bersifat rinci.

Disadari sepenuhnya bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu guna meningkatkan mutu penyajian data statistik potensi desa berikutnya diharapkan saran dan kritik dari para pembaca.



Surabaya, Maret 2000

Kepala Badan Pusat Statistik  
Propinsi Jawa Timur

Mukadi Hadiwidjojo, M.Sc  
NIP. 340003227

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Metodologi Survei .....	1
1.3 Tujuan Penulisan .....	2
2. UMUM .....	3
3. KEPENDUDUKAN, PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP .....	4
3.1 Kependudukan .....	4
3.2 Lingkungan Hidup .....	5
3.3 Perumahan .....	9
4. PENDIDIKAN .....	10
5. SOSIAL BUDAYA .....	13
5.1 Tempat Ibadah .....	13
5.2 Kegiatan/Institusi Sosial Masyarakat .....	14
5.3 Olah Raga .....	15
5.4 Rekreasi dan Hiburan .....	16
6. KESEHATAN .....	18
6.1 Sarana Kesehatan .....	18
6.2 Tenaga Kesehatan .....	19
6.3 Wabah Penyakit dan Kasus Kekurangan Gizi .....	21
6.4 Sumber Air Minum/Memasakan Mandi/Mencuci .....	23
7. PERHUBUNGAN .....	25
7.1 Angkutan .....	25
7.2 Komunikasi .....	26
8. EKONOMI .....	29
8.1 Sarana Produksi Pemasaran .....	29
8.2 Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga .....	30
8.3 Perbankan .....	31
8.4 Koperasi .....	32
8.5 Keadaan Ekonomi Secara Umum .....	33
9. KEAMANAN .....	34
10. PENUTUP .....	36

iv



# PENDAHULUAN

---

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan daerah khususnya untuk mengambil kebijaksanaan dan menentukan skala prioritas maka data yang berkaitan dengan potensi suatu wilayah sangat diperlukan keberadaannya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, BPS telah melakukan pengumpulan data melalui Podes (Potensi Desa). Podes pertama kali dilakukan pada tahun 1980 bersamaan dengan sensus penduduk, kemudian pada tahun 1983 bersamaan dengan Sensus Pertanian dan pada tahun 1986 bersamaan dengan Sensus Ekonomi. Pada dekade 1990 – 2000 pengumpulan data Podes selain dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan sensus, juga pernah dilakukan pada tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan program IDT (Identifikasi desa tertinggal).

Data Podes 2000 bersama dengan hasil SP2000 dapat digunakan sebagai bahan penyusun statistik wilayah kecil (small area statistics), yang baru pertama kali dihasilkan BPS. Namun pada publikasi Podes kali ini hasilnya belum bisa diintegrasikan dengan data hasil SP2000, karena kegiatan SP masih pada tahap pengolahan.

## 1.2 Metodologi Survei

Pencacahan Podes dilakukan dengan cara sensus diseluruh desa/kelurahan yang keberadaannya didasarkan SK Mendagri/ SK Gubernur, serta seluruh Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan seluruh Pemukiman Masyarakat Terasing (PMT). Pencacahan dilakukan dengan wawancara langsung terhadap kepala desa/lurah atau staf yang ditunjuk untuk mewakilinya. Petugas pencacah Podes SP2000 membuat satu rangkap dan kemudian dikirim ke BPS Kabupaten/Kota untuk diolah.

Data yang dikumpulkan dalam survei Podes 2000 meliputi keterangan umum desa/kelurahan, kependudukan dan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman,

pendidikan, sosial budaya, rekreasi dan hiburan, kesehatan, gizi dan keluarga berencana, perhubungan, lahan dan penggunaannya, ekonomi, keamanan dan keterangan kepala desa/kelurahan.

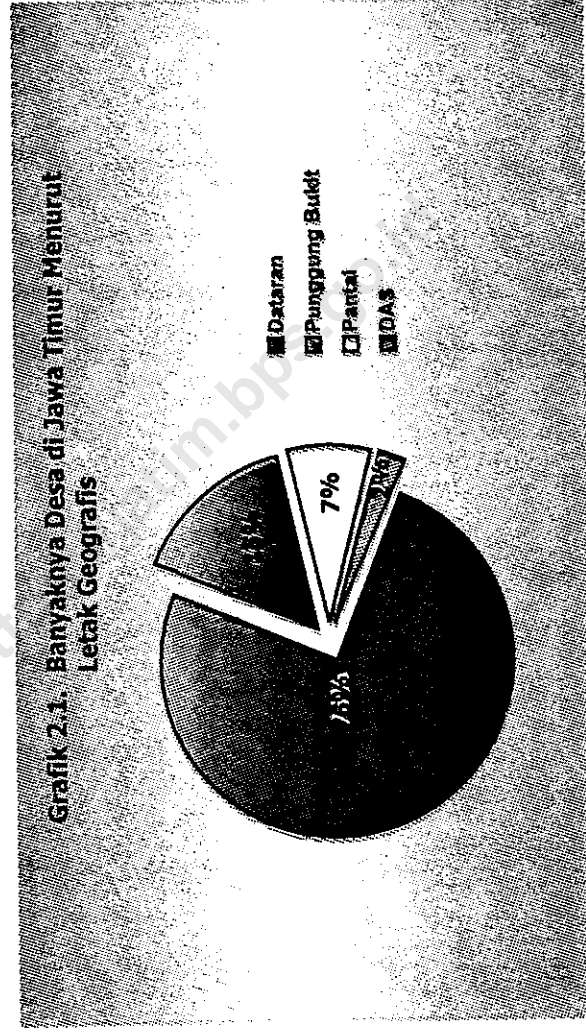
### 1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan laporan eksekutif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai potensi desa di Jawa Timur pada tahun 1999 berdasarkan data hasil Podes SP2000.

<https://jatim.bps.go.id>

# U M U M

Luas wilayah Jawa Timur berdasarkan hasil pencacahan Podes SP2000 adalah 36.160,661 kilometer persegi (tidak termasuk luas hutan negara/perkebunan negara, kecuali yang dikerjakan/digarap penduduk misalnya berupa sawah, ladang dan lain sebagainya). Propinsi Jawa Timur terdiri dari 37 Daerah Tingkat II (29 kabupaten dan 8 kota) dan 8.416 desa (8.416 desa definitif dan 41 desa persiapan). Dari seluruh desa yang ada, 7.197 diantaranya berstatus desa dan 1.263 kelurahan. Berdasarkan klasifikasi desa definitif, terdapat 7.143 desa swasembada, 894 desa swakarya dan 379 desa swadaya.



Berdasarkan letak geografis, sebagian besar wilayah Jawa Timur merupakan dataran (6.395 desa), sedangkan lainnya merupakan punggung bukit (1.253 desa), pantai (620 desa) dan Daerah Aliran Sungai atau DAS (189 desa).



## KEPENDUDUKAN, LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

### 3.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan hasil Podes 2000 adalah sebanyak 33.794.326 orang dengan tingkat kepadatan sebesar 934,56 orang/km<sup>2</sup>. Berdasarkan penyebarannya menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan (58,96 persen). Selanjutnya jumlah rumahtangga di Jawa Timur sebanyak 8.373.167 rumahtangga, dimana sebagian besar rumahtangganya merupakan rumahtangga pertanian (57,96 persen).

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh PLKB di kecamatan mengenai jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I, Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta/akseptor KB, diketahui bahwa di Jawa Timur terdapat 4.012.746 keluarga prasejahtera dan sejahtera I dan 4.012.746 PUS. Dari sejumlah PUS yang ada terdapat 5.117.610 (73,56 persen) peserta/akseptor KB.

Sebagian besar desa yaitu sebanyak 7.423 desa mayoritas penduduknya mempunyai sumber penghasilan dari sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor pertanian tanaman pangan (6.932 desa), perikanan (243 desa), perkebunan (181 desa), peternakan (31 desa), pertanian lainnya (30 desa) dan kehutanan (6 desa).

Selanjutnya untuk komponen pengguna listrik, tercatat bahwa hampir seluruh pelanggan menggunakan listrik yang bersumber dari PLN yaitu sebanyak 8.196 desa atau 96,91 persen desa. Sedangkan sisanya sebanyak 965 desa atau 4,09 persen desa memiliki mayoritas RT pelanggan listrik non PLN.

Jenis bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar rumahtangga untuk memasak adalah kayu bakar terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Sedangkan untuk daerah perkotaan, mayoritas penduduknya menggunakan minyak tanah. Secara keseluruhan tercatat sebanyak 6.200 desa (73,31 persen desa) mayoritas penduduknya menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar, 2.214 desa (26,18 persen desa) menggunakan minyak tanah, 28 desa (0,33 persen desa)

menggunakan LPG dan 15 desa (0,18 persen desa) mayoritas penduduknya menggunakan bahan bakar jenis lainnya untuk memasak.

Gambaran umum mengenai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain kesadaran penduduk dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui cara membuang sampah, buang air besar dan keadaan saluran air disekitar rumah. Gangguan terhadap lingkungan hidup akan mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan hidup (air, tanah, udara, flora dan fauna) baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan mahluk hidup, yang biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Gangguan ini bisa terjadi dengan sendirinya (alamiah) atau disebabkan oleh aktivitas manusia.

Dalam hal pembuangan sampah, ada empat cara yang dilakukan masyarakat yaitu membuang sampah ke tempat sampah kemudian diangkut, ke dalam lubang/dibakar, ke sungai dan cara lainnya. Dari keempat cara di atas sebagian besar masyarakat menggunakan cara kedua yaitu membuang sampah ke dalam lubang/dibakar terutama mereka yang tinggal di pedesaan. Sedangkan pada desa-desa yang berstatus perkotaan, umumnya menggunakan cara pertama yaitu membuang sampah ke tempat sampah kemudian diangkut. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

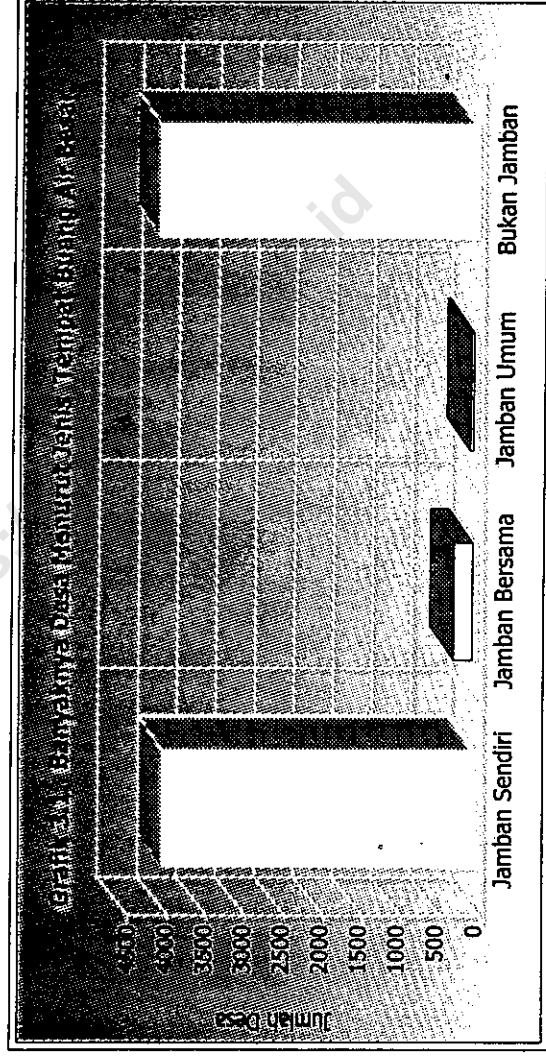
**Tabel 3.1. Banyaknya Desa Menurut Cara Mengelola Sampah dan Status Desa**

Cara Pembuangan Sampah	Status Desa			% Total	
	K	D	K + D	K	D
1. Ke tempat sampah kemudian diangkut	641	170	811	50,75	23,6
2. Ke lubang/dibakar	580	5.853	6.433	45,92	81,36
3. Ke sungai	8	89	97	0,63	1,24
4. Cara lainnya	34	1.082	1.116	2,69	15,04
	1.263	7.194	8.457	100,00	100,00



Selanjutnya untuk tempat buang air besar, ada empat jenis yang digunakan sebagian besar rumah tangga yaitu jamban sendiri, jamban bersama, jamban umum dan bukan jamban. Tercatat sebanyak 4.093 desa (48,40 persen) umumnya menggunakan tempat buang air besar bukan jamban terutama pada daerah pedesaan, dan 4.040 desa (47,77 persen) menggunakan jamban sendiri terutama pada daerah perkotaan.

Selanjutnya mengenai keadaan saluran pembuangan limbah cair/air kotor di Jawa Timur, secara umum kondisi saluran di desa-desa cukup lancar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tercatat sebanyak 5.318 desa (62,88 persen) memiliki saluran pembuangan limbah cair/air kotor yang lancar, sedangkan 2.647 desa (31,30 persen) tidak memiliki saluran pembuangan limbah cair/air kotor. Sisanya, 399 desa (4,72 persen) memiliki saluran pembuangan limbah cair/air kotor yang tidak lancar dan 93 desa (1,10 persen) memiliki saluran yang tergenang.

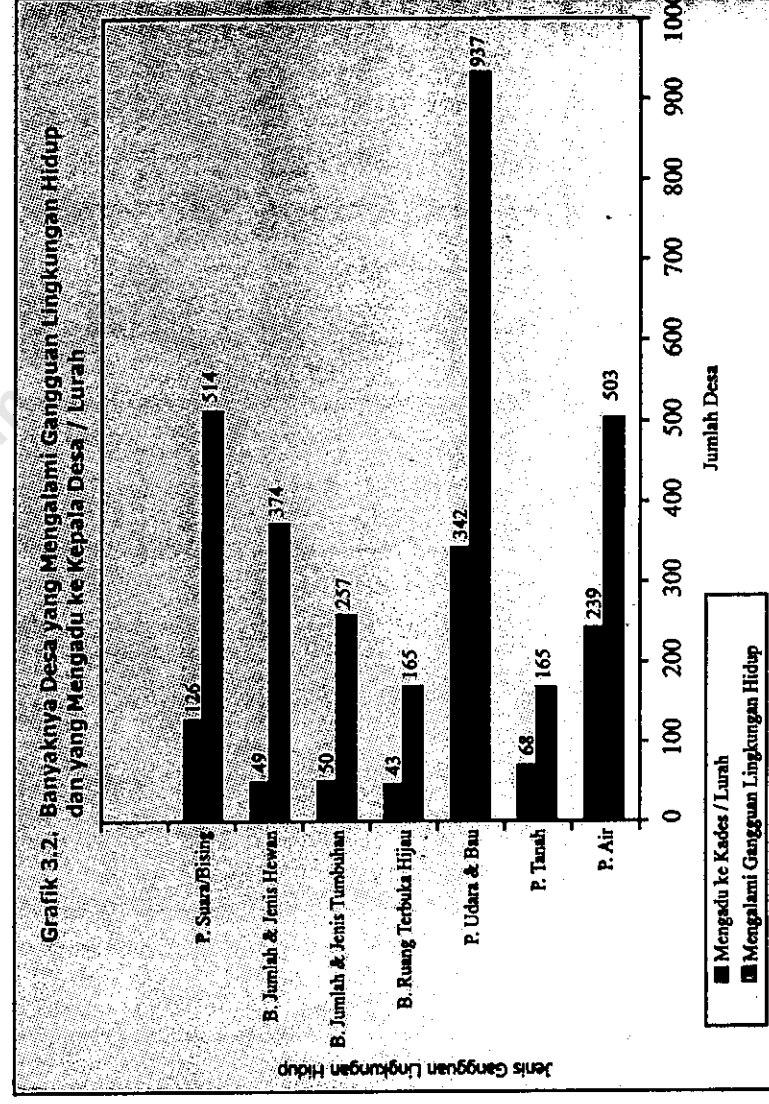


Hal lain yang dapat menyebabkan adanya gangguan lingkungan hidup di suatu wilayah adalah adanya pencemaran baik air, udara maupun tanah yang sekaligus akan mengakibatkan adanya gangguan berupa berkurangnya ruang terbuka hijau, berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan, berkurangnya jumlah dan jenis hewan dan pencemaran suara/bising. Pencemaran atau gangguan tersebut disebabkan oleh adanya industri yang semakin berkembang di wilayah tersebut.

Dari hasil Podes 2000 diketahui bahwa di Jawa Timur terdapat 215.809 buah industri yang tersebar pada 6.898 desa. Jenis industri yang ada tersebut terdiri dari 670 industri penyamakan kulit (0,31 persen), 53.012 industri pengolahan makanan (24,56 persen), 44.582 industri pembakaran batu-bata/genteng/kapur (20,66 persen), 2.177 industri batik (1,01 persen) dan 115.368 industri lainnya (53,46 persen).

Adapun jenis limbah yang dihasilkan dari seluruh industri tersebut adalah limbah padat, cair, gas dan suara/getaran. Untuk limbah yang berbentuk padat terdapat pada 3.019 desa, berbentuk cair pada 1.571 desa, berbentuk gas pada 530 desa dan suara/getaran pada 1.012 desa.

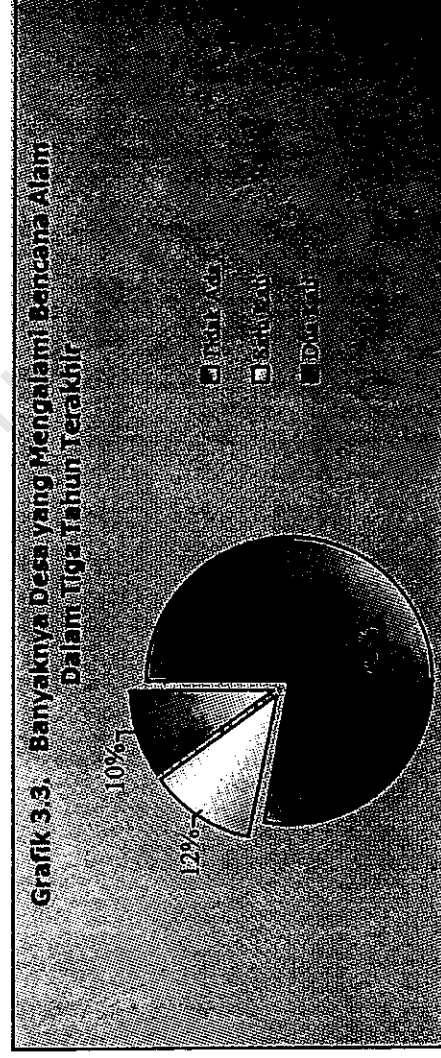
Dari 6.898 desa yang mempunyai industri, terdapat beragam gangguan lingkungan hidup akibat polusi/pencemaran, di mana polusi udara dan debu merupakan yang pencemaran terbesar (937 desa), diikuti oleh polusi suara/bising (514 desa), polusi air (503 desa) dan polusi tanah (165 desa). Gangguan lingkungan hidup lainnya yang juga terjadi adalah berkurangnya jumlah dan jenis hewan di 374



desa, berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan di 257 desa dan berkurangnya ruang terbuka hijau di 165 desa.

Meskipun demikian, tidak semua desa yang mengalami gangguan lingkungan hidup mengadukannya ke kepala desa/lurah. Dari 503 desa yang mengalami pencemaran air, hanya 239 desa (47,51 persen) yang mengadukannya ke kepala desa/lurah. Untuk pencemaran tanah sebanyak 68 desa (41,21 persen) mengadukannya ke kepala desa/lurah, polusi udara dan bau sebanyak 342 desa (36,50 persen), berkurangnya ruang terbuka hijau sebanyak 43 desa (26,06 persen), berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan sebanyak 50 desa (19,46 persen), berkurangnya jumlah dan jenis hewan sebanyak 49 desa (13,10 persen) dan pencemaran suara/bising sebanyak 126 desa (24,51 persen).

Gangguan lingkungan hidup yang terjadi dengan sendirinya misalnya bencana alam. Dalam Podes 2000 bencana alam yang dicatat adalah bencana yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Dalam tiga tahun terakhir sebanyak 820 desa (7,70 persen) mengalami bencana alam sedikitnya dua kali, 1.020 desa (12,06 persen) mengalami bencana alam hanya satu kali dan 6.617 desa (78,24 persen) tidak mengalami bencana alam.



Salah satu indikator adanya gangguan lingkungan hidup adalah adanya lahan kritis yaitu lahan yang keadaannya membahayakan stabilitas dan kelangsungan tata air serta alam lingkungan, atau lahan pertanian yang sudah tidak subur lagi untuk ditanami. Di Jawa Timur, sebanyak 1.135 desa (13,42 persen) memiliki lahan kritis. Informasi lainnya yang dicakup dalam Podes 2000 yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah adanya lokasi penggalian golongan C.

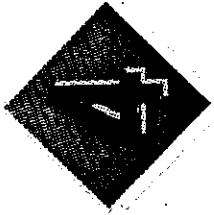
Lokasi penggalian golongan C untuk batu/koral terdapat di 1.089 desa, pasir di 1.298 desa, kapur di 311 desa, belerang di 10 desa, kaolin di 22 desa, pasir kwarsa di 96 desa, tanah liat di 753 desa dan lainnya di 392 desa.

### 3.3 Perumahan

Data perumahan yang dicakup pada Podest 2000 adalah informasi mengenai banyaknya bangunan rumah yang ada di Jawa Timur menurut kualitas bangunan. Jumlah seluruh bangunan rumah yang ada sebanyak 8.108.472 buah yang terdiri dari 5.372.028 buah (66,25 persen) rumah permanen dan 2.736.444 buah (33,75 persen) bukan permanen.

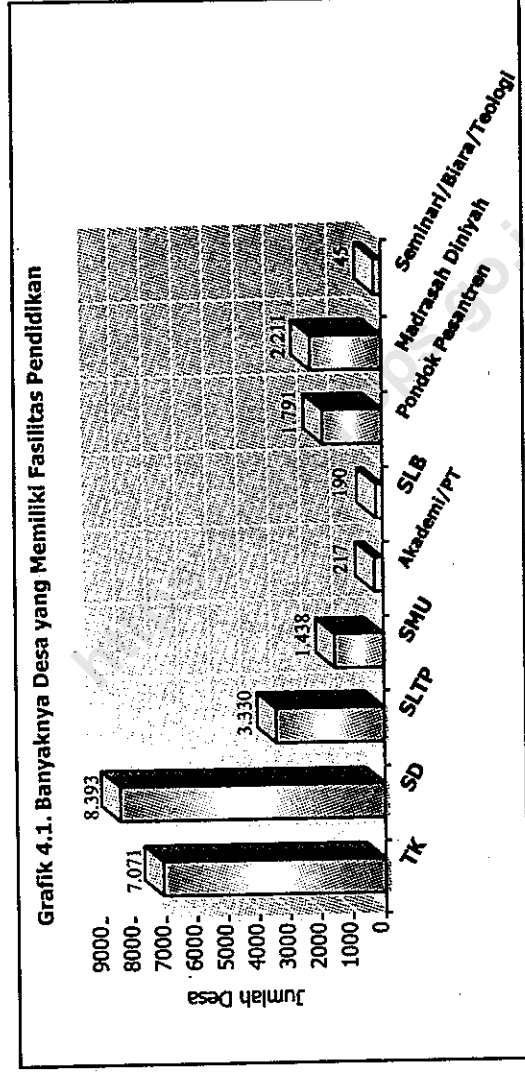
Selanjutnya untuk lokasi permukiman kumuh banyak terdapat pada daerah perkotaan, yang tersebar pada 99 desa atau 1,17 persen dari seluruh desa di Jawa Timur. Sedangkan pada daerah pedesaan lokasi permukiman kumuh tersebar pada 76 desa atau 0,9 persen.

Untuk mengatasi masalah perumahan yang ada di Propinsi Jawa Timur, maka melalui pembangunan rumah baru yang dilakukan oleh pengembang (*developer*) telah dibangun perumahan pada hampir semua daerah tingkat II, kecuali Kabupaten Blitar. Ada empat jenis rumah yang dibangun oleh pengembang yaitu tipe rumah sangat sederhana (RSS) sebanyak 27,55 persen, rumah sederhana (RS) sebanyak 45,96 persen, rumah menengah sebanyak 23,24 persen dan rumah mewah sebanyak 3,25 persen.



# PENDIDIKAN

Informasi pendidikan yang dicakup dalam Podes 2000 meliputi informasi mengenai lembaga pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Dalam survei ini dicatat pula sekolah taman kanak-kanak, SLB, pondok pesantren, madrasah diniyah, dan seminari/biara/teologi serta pendidikan ketrampilan. Semakin banyak fasilitas pendidikan yang tersedia maka semakin besar peluang masyarakat untuk dapat menikmati sarana tersebut.

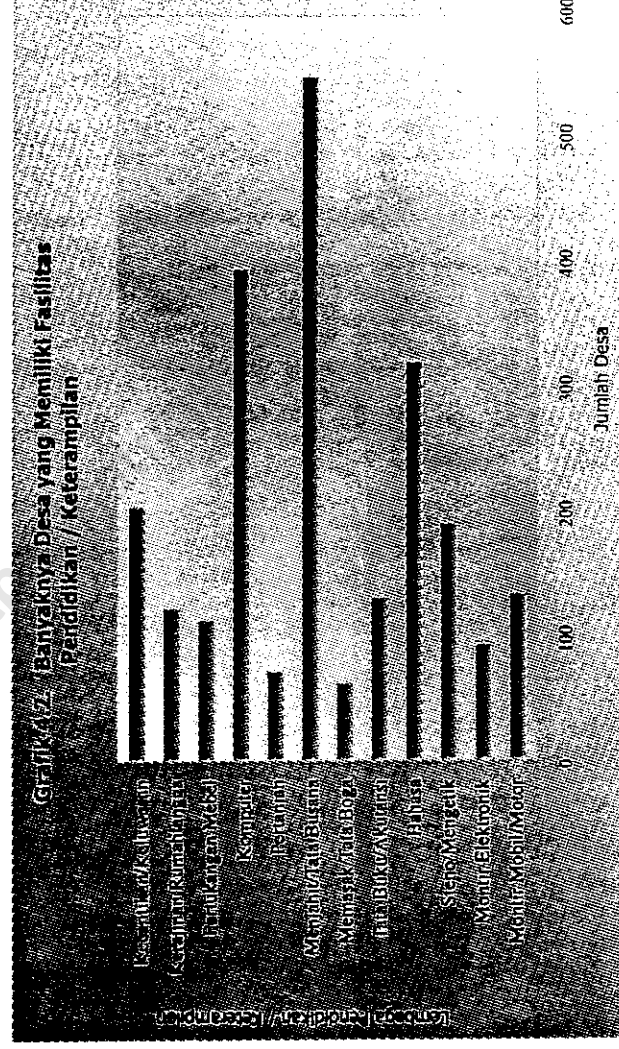


Dari hasil Podes 2000 diketahui bahwa fasilitas pendidikan yang ada di seluruh daerah tingkat II di Jawa Timur sudah mencapai tingkat akademi/ perguruan tinggi. Banyaknya desa yang memiliki fasilitas pendidikan TK sebanyak 7.071 desa, fasilitas pendidikan SD dan sederajat 8.393 desa, fasilitas pendidikan SLTP dan sederajat 3.330 desa, fasilitas pendidikan SMU dan sederajat 1.438 desa dan fasilitas pendidikan Akademi/Perguruan Tinggi 217 desa. Sedangkan jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan informal seperti SLB terdapat sebanyak 190 desa, Pondok Pesantren 1.791 desa, Madrasah Diniyah 2.211 desa dan seminari/Biara/Teologi 45 desa.

Partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan nampaknya cukup tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya rumahtangga yang menyekolahkan anak/familinya sampai ke PT dan tingkat kecenderungan masyarakat yang putus sekolah semakin berkurang. Tercatat sebanyak 211.569 rumahtangga yang menyekolahkan anak/familinya sampai ke PT terutama berasal dari rumahtangga yang tinggal di perkotaan.

Selanjutnya secara umum gambaran mengenai berkurangnya kecenderungan putus sekolah menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut pada tingkat SD terdapat 3.603 desa (51,00 %), pada tingkat SLTP sebanyak 3.281 desa (45,18 %).

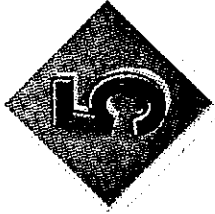
Untuk lembaga pendidikan keterampilan ada 12 jenis yang tersebar pada beberapa daerah tingkat II di Jawa Timur. Jenis lembaga pendidikan keterampilan yang dimaksud antara lain montir mobil/motor (134 desa), montir elektronik ( 93



desa), steno/mengetik (191 desa), bahasa (317 desa), tata buku/akutansi (131 desa), memasak/tata boga (62 desa), menjahit/tata busana (546 desa), pertanian (71 desa), komputer (394 desa), pertukangan mebel (114 desa), kerajinan rumahtangga (124 desa) dan kecantikan/keluasan (205 desa).

Perhatian pemerintah maupun swasta terhadap masyarakat desa dalam bidang pendidikan selain diwujudkan dalam bentuk pembangunan/penyediaan fasilitas pendidikan, juga dalam bentuk bantuan berupa beasiswa melalui GNOTA dan program JPS. Di Jawa Timur terdapat 134.073 anak yang tercatat mendapat bantuan pendidikan dari GNOTA, sedangkan dari program JPS terdapat sebanyak 422.700 anak.

<https://jatim.bps.go.id>



# SOSIAL BUDAYA

Kegiatan dan fasilitas sosial budaya yang dicakup dalam pengumpulan data Potensi Desa 2000 antara lain tempat ibadah, kegiatan/institusi sosial kemasyarakatan, fasilitas dan kelompok kegiatan olah raga, serta sarana hiburan/rekreasi yang ada di desa.

## 5.1 Tempat Ibadah

Tempat ibadah merupakan sarana penting yang harus ada di suatu desa, sehingga penduduk akan lebih mudah untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Semakin banyak pemeluk suatu agama, seharusnya semakin banyak pula tempat ibadah yang tersedia.

Tabel 5.1 Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Status Desa

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah (bangunan)			Rata-rata per desa		
		K	D	K+D	K	D	K+D
1	Masjid	4.854	28.195	33.049	0,84	0,92	0,91
2	Surau/langgar	21.536	116.075	137.611	17,05	16,13	16,27
3	Gereja/kapel/Kristen Protestan	992	18.777	28.669	0,79	0,26	0,34
4	Gereja/kapel Katolik	204	260	464	0,16	0,04	0,05
5	Pura	72	338	410	0,06	0,05	0,05
6	Vihara	70	91	161	0,06	0,01	0,02

Berdasarkan data Podes 2000 diketahui bahwa jumlah masjid di Jawa Timur 33.045 bangunan, jumlah surau/langgar mencapai 137.611 bangunan, jumlah gereja/kapel kristen protestan mencapai 2.869 bangunan. Adapun untuk gereja/kapel Katolik sebanyak 464, pura 410 dan vihara 161.

Apabila diperhatikan rata-rata jumlah tempat ibadah per desa, tampak bahwa rata-rata setiap desa mempunyai sekitar 4 masjid dan 16 surau/langgar.



Adapun untuk gereja/kapel kristen protestan ada satu buah untuk setiap sekitar 3 desa, gereja /kapel katolik dan vihara ada satu buah untuk sekitar 20 desa dan untuk vihara ada satu buah untuk sekitar 50 desa. Untuk sebagian besar tempat ibadah rata-rata di desa perkotaan memiliki lebih banyak tempat ibadah dibanding desa pedesaan, kecuali untuk masjid justru di daerah pedesaan rata-ratanya lebih besar dibanding perkotaan.

Memperhatikan perbandingan rata-rata tempat ibadah per desa menurut agama, tampaknya komposisinya sudah cukup mencerminkan komposisi pemeluknya, yaitu Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Jawa Timur maka jumlah masjid dan surau jumlahnya sangat dominan, selanjutnya berturut-turut disusul tempat ibadah agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

## 5.2 Kegiatan/Institusi Sosial Kemasyarakatan

Banyaknya kegiatan dan institusi sosial kemasyarakatan merupakan salah satu cerminan besarnya kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada. Melalui berbagai kegiatan dan institusi sosial kemasyarakatan beberapa permasalahan bisa didiskusikan, dicari jalan pemecahannya maupun penyalurannya, dan khusus melalui institusi kepemudaan

Tabel 5.2. Banyaknya Desa yang Memiliki Institusi/kegiatan sosial kemasyarakatan

No	Jenis Institusi/Kegiatan	Jumlah (buah)			% Terhadap Total Desa		
		K	D	K+D	K	D	K+D
1	Gugus Depan Pramuka	1.095	5.939	7.034	86,70	82,55	83,177
2	Panti Asuhan	201	182	383	15,91	2,53	4,63
3	Panti Wreda/Jompo	31	23	54	2,45	0,32	0,64
4	Panti Cacat	36	36	72	2,85	0,50	0,85
5	Majelis Taklim/Pengajian/Kebeaktian	1.145	5.920	7.065	90,66	82,29	83,54
6	Karang Taruna	1.211	6.276	7.487	95,83	67,24	69,55
7	PKK	1.259	7.111	8.370	99,68	66,65	98,97
8	Artisan	1.240	8341	9.581	96,18	95,09	95,55
9	Gotong royong	1.214	6975	8.189	96,12	96,96	96,83
10	Pengumpul Zakat Infaq dan Sodalitas	1.170	5.850	7.020	92,64	61,32	65,01

Sumber: Podest 2000

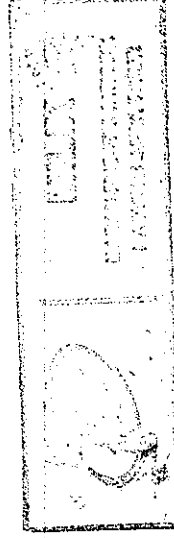
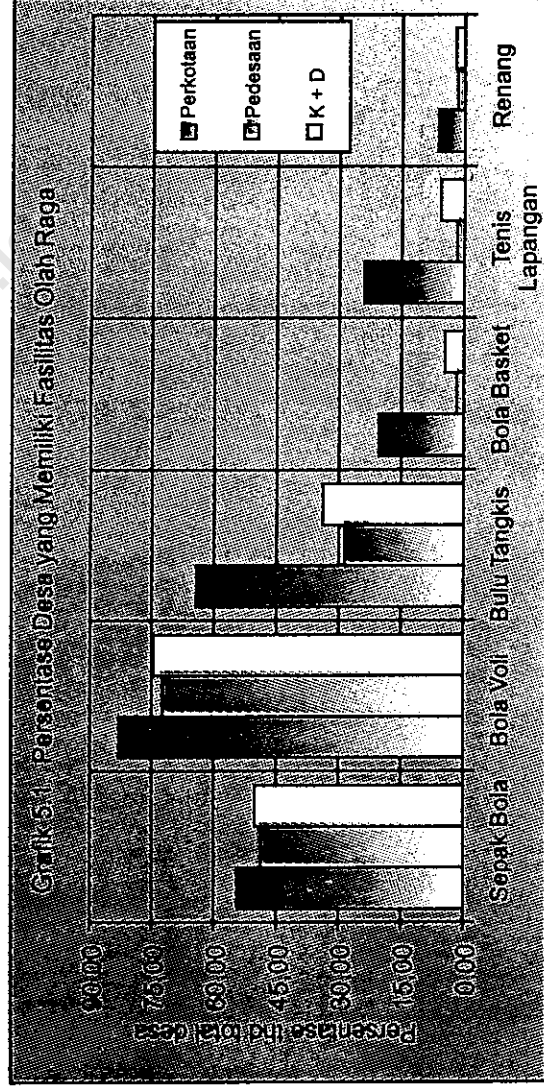
seperti pramuka dan karang taruna bisa dikembangkan kreatifitas dan aktifitas positif bagi remaja dan pemuda.

Kegiatan/institusi sosial kemasyarakatan yang paling banyak adalah PKK yaitu mencapai hampir seluruh desa yang ada, berikutnya adalah gotong royong dan arisan. Kegiatan lain yang mencapai hampir 90 persen desa adalah Karang Taruna, Majelis taklim/pengajian/kebaktian, Gugus Depan Pramuka, dan Pengumpul Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS).

Apabila disimak lebih lanjut, tampak bahwa persentase desa yang mempunyai kegiatan/institusi sosial kemasyarakatan lebih banyak di desa perkotaan dibanding di desa pedesaan, kecuali untuk gotong royong.

### 5.3 Olah Raga

Kegiatan olah raga merupakan aktifitas fisik yang sangat berguna untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh manusia, bahkan juga merupakan ajang prestasi mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, sampai tingkat dunia. Tetapi sayangnya sebagian besar kegiatan olah raga terutama yang berbentuk permainan memerlukan tempat khusus yang cukup luas dan juga memerlukan peralatan khusus yang cukup mahal, sehingga tidak semua desa bisa memilikinya. Berkaitan dengan kegiatan olah raga tersebut, agar bisa terarah dan berkembang dengan baik juga diperlukan adanya organisasi/perkumpulan yang mawadahi dan mengelolanya.



Berdasarkan data Podes 2000 diketahui bahwa sekitar tujuh diantara sepuluh desa memiliki lapangan bola voli, selanjutnya hampir separuh desa yang ada di Jawa Timur memiliki lapangan sepak bola dan tiga diantara sepuluh desa memiliki lapangan bulu tangkis. Adapun yang memiliki fasilitas olah raga lainnya, untuk setiap seratus desa yang ada sekitar lima diantaranya memiliki fasilitas tenis lapangan, sekitar empat diantaranya memiliki lapangan bola basket dan sekitar dua diantaranya memiliki kolam renang.

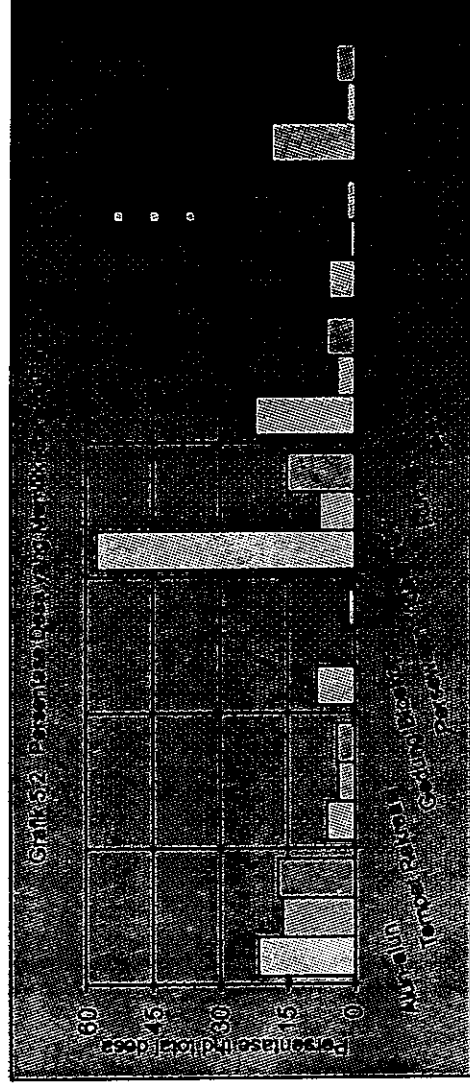
Lebih lanjut apabila Grafik 5.1 di atas diperhatikan secara seksama menurut daerah perkotaan dan pedesaan, tampak adanya perbedaan persentase yang cukup tajam antara desa perkotaan yang memiliki fasilitas olah raga dibanding dengan desa pedesaan. Hal ini mencerminkan bahwa perhatian masyarakat terhadap kegiatan olah raga lebih besar pada masyarakat perkotaan di banding masyarakat pedesaan. Hal lain yang juga mencerminkan keadaan ini adalah persentase desa perkotaan yang memiliki kelompok kegiatan olah raga lebih banyak dibanding di daerah pedesaan.

#### 5.4 Rekreasi dan Hiburan

Sarana rekreasi/hiburan merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas sehari-hari. Dalam masyarakat modern keberadaan sarana rekreasi/hiburan menjadi sangat penting, karena rekreasi/hiburan sudah merupakan bagian dari kebutuhan dasarnya dan bahkan bisa juga dikatakan sebagai gaya hidup.

Tempat hiburan/rekreasi yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan fasilitas umum yang seharusnya disediakan untuk masyarakat, seperti alun-alun atau lapangan terbuka yang biasanya digunakan untuk kegiatan santai, bermain, hiburan ataupun olah raga. Diantara 8.457 desa yang ada di Jawa Timur, hanya 1.456 desa atau sekitar 17 persen yang mempunyai alun-alun atau tempat terbuka. Untuk daerah perkotaan, diantara 1.263 desa perkotaan sekitar 22 persen diantaranya (274 desa) yang memiliki fasilitas dimaksud, sedangkan untuk daerah pedesaan, diantara 7.194 desa pedesaan, sekitar 16 persen diantaranya (1.182 desa) yang memilikinya. Sarana hiburan lain yang cukup menonjol terutama di daerah perkotaan adalah tempat persewaan video/VCD/LD/DVD dan rumah bilyard

Untuk sebagian besar sarana hiburan/rekreasi diluar alun-alun/tempat terbuka, terdapat perbedaan yang sangat nyata antara daerah perkotaan dan pedesaan, yaitu untuk daerah perkotaan persentase desa yang memiliki sarana hiburan/rekreasi jauh lebih banyak dibanding desa pedesaan, sebagaimana tampak pada Grafik 5.2. Namun hal yang patut diwaspadai, beberapa tempat hiburan bisa jadi dimanfaatkan dan disalahfungsikan untuk kegiatan yang tidak benar, seperti persewaan video/CVD dipergunakan untuk persewaan video porno, rumah bilyard dipergunakan sebagai arena perjudian terselubung dan pub/diskotik/karaoke seringkali menjadi tempat mabuk-mabukan, transaksi obat-obatan terlarang (narkoba) ataupun kegiatan negatif

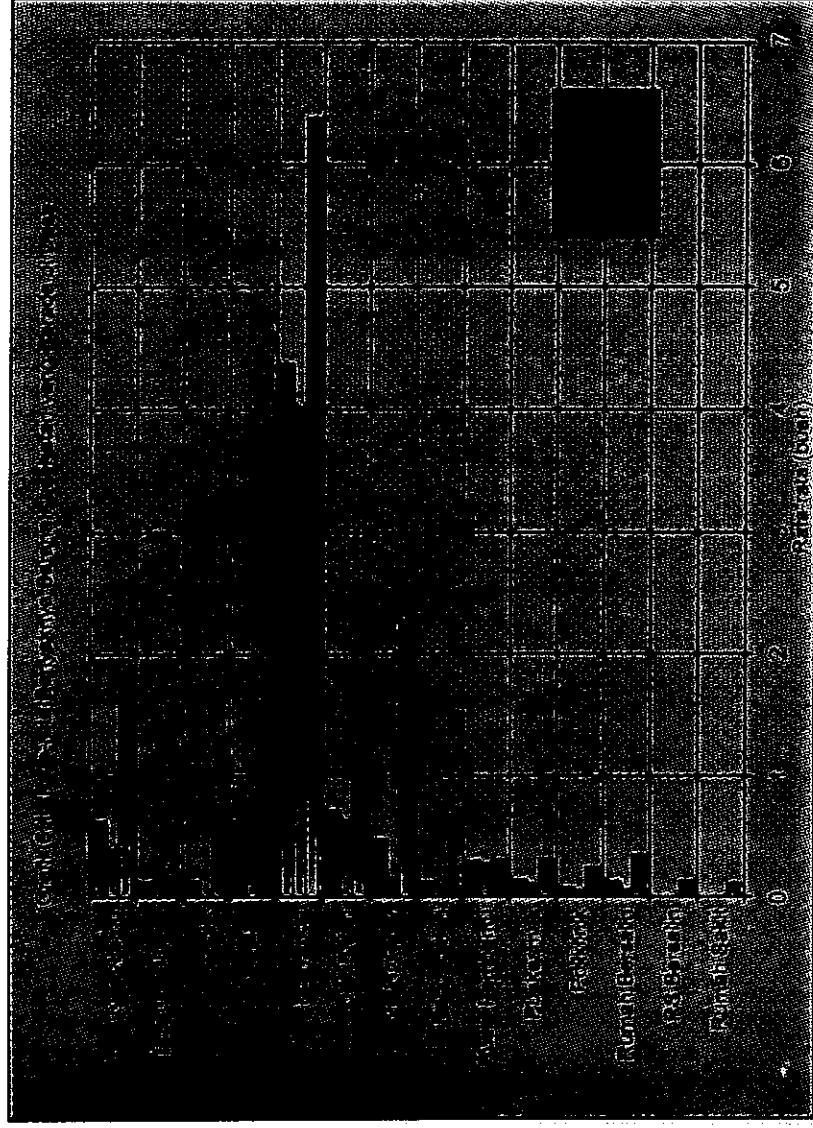




# KESEHATAN

## 6.1 Sarana Kesehatan

Tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh penduduk, karena keterlambatan dalam penanganan kesehatan bisa berakibat fatal, seperti gangguan kesehatan permanen (gangguan metabolisme tubuh, gangguan fungsi organ tubuh, cacat, gangguan mental dan fungsi otak), bahkan seringkali keterlambatan dalam penanganan kesehatan tersebut akan berakibat kematian.



Sarana kesehatan yang paling banyak terdapat di desa adalah Posyandu, yaitu rata-rata di setiap desa terdapat 4 Posyandu, dimana untuk desa perkotaan rata-rata terdapat lebih dari 6 posyandu per desa dan untuk desa pedesaan rata-rata terdapat sekitar 4 posyandu per desa. Pelayanan kesehatan lain yang terdapat hampir di semua desa adalah tempat praktek bidan dan polindes, serta toko khusus yang

menjual obat/ jamu. Sedangkan untuk tempat praktek dokter, untuk setiap dua desa pada umumnya terdapat satu tempat praktek dokter.

Sarana kesehatan penting lainnya yang sangat diperlukan masyarakat adalah rumah sakit dan Puskesmas. Untuk rumah sakit dan rumah sakit bersalin ternyata untuk setiap sekitar 50 desa dilayani oleh satu rumah sakit, untuk sekitar 8 desa dilayani satu Puskesmas dan untuk sekitar 4 desa dilayani satu Puskesmas Pembantu.

Apabila kita perhatikan persebaran fasilitas kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan ternyata masih terdapat perbedaan yang cukup tajam, yaitu sarana dan pelayanan kesehatan pada umumnya masih terpusat di daerah perkotaan. Khusus untuk Puskesmas Pembantu tampaknya penyebarannya cukup merata, yaitu baik di daerah perkotaan maupun pedesaan rata-rata untuk setiap 3-4 desa terdapat satu Puskesmas Pembantu.

Sekalipun jumlah sarana dan pelayanan kesehatan yang ada saat ini bisa dibilang masih kurang memadai atau penyebarannya masih kurang merata, namun demikian secara umum lebih dari 80 persen desa yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan, menyatakan mudah untuk menjangkau masing-masing sarana kesehatan. Bahkan untuk daerah perkotaan persentase yang menyatakan mudah tersebut mencapai lebih dari 90 persen. Dengan demikian yang harus mendapatkan perhatian adalah sekitar 10 persen desa perkotaan dan sekitar 20 persen desa pedesaan yang ternyata sulit untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang diperlukan.

## 6.2 Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang bertempat tinggal di suatu daerah merupakan alternatif bagi penduduk sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk mendapatkan pertolongan dini maupun darurat. Tenaga yang ada biasanya tidak hanya yang mempunyai latar belakang kemampuan medis seperti dokter, bidan dan petugas kesehatan lainnya, tetapi banyak juga yang merupakan tenaga bukan medis misalnya dukun dan tukang pijat. Khusus untuk dukun bayi, sudah cukup banyak yang mendapatkan pelatihan secara medis atau disebut juga dengan istilah dukun bayi terlatih.

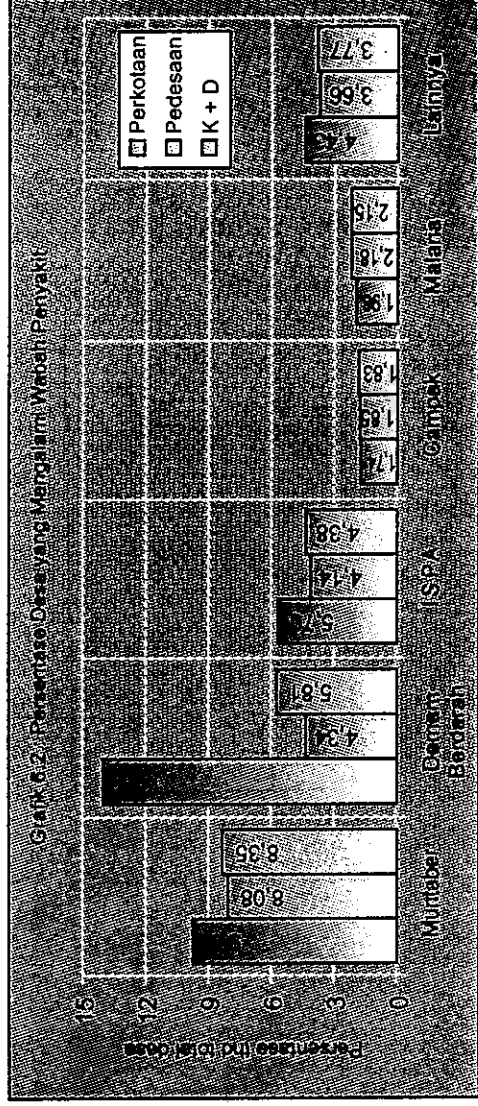
Apabila kita perhatikan Tabel 6.1 tampak bahwa tenaga kesehatan yang hampir ada di semua desa adalah tenaga non medis yaitu tukang pijat dan dukun bayi terlatih. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang mempunyai latar belakang medis yang paling banyak adalah Bidan di Desa (BDD) terutama untuk daerah pedesaan, selanjutnya disusul paramedis dan dokter.

Lebih lanjut apabila kita perhatikan Tabel 6.1, tampak bahwa sebagaimana halnya dengan sarana kesehatan, tampaknya tenaga kesehatan yang berlatar belakang kemampuan medis seperti dokter, bidan dan tenaga medis lain, pada umumnya lebih banyak tinggal di daerah perkotaan. Tetapi untungnya ada tenaga Bidan di Desa (BDD) yang ditempatkan di daerah pedesaan sejak beberapa tahun terakhir ini, sehingga pada saat ini di daerah terpencilpun sudah banyak yang terjangkau oleh tenaga medis.

### 6.3 Wabah Penyakit dan Kasus Kekurangan Gizi

Wabah penyakit yang melanda penduduk suatu daerah apabila tidak segera diberikan pertolongan sering kali mengakibatkan kematian. Karena wabah penyakit sifatnya mudah menular, maka biasanya segera setelah ada tanda-tanda serangan/korban harus secepatnya diberikan penanganan *preventif/dini* seperti pembasmian dan pembersihan tempat-tempat yang diduga menjadi sarang penyakit, sehingga wabah tersebut tidak menyebar lebih luas lagi.

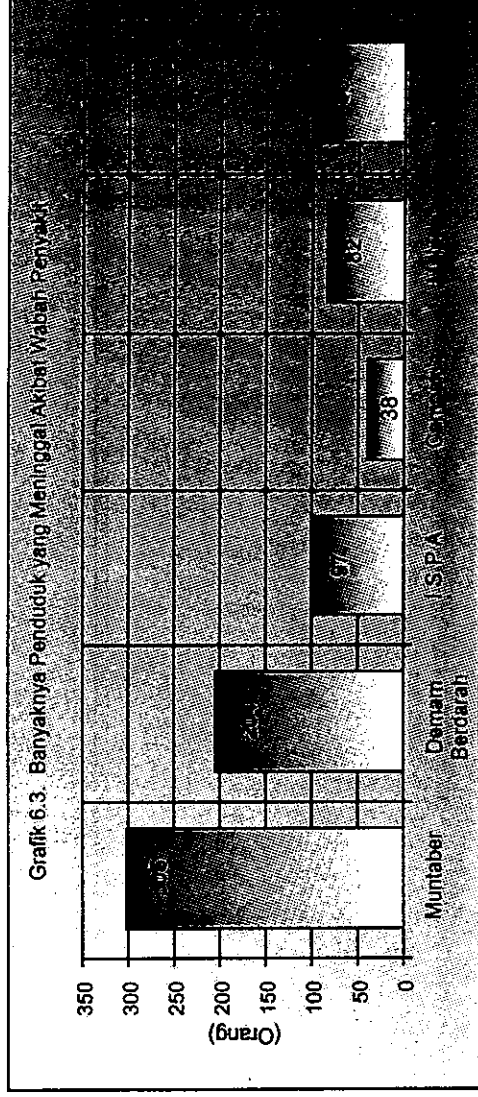
Berdasarkan data Podes 2000 diketahui bahwa selama setahun yang lalu wabah penyakit yang paling banyak terjadi adalah muntaber/diare yaitu mencapai sekitar 8,35 persen atau sebanyak 706 desa, kemudian disusul demam berdarah



mencapai sekitar 5,81 persen atau sebanyak 491 desa dan Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) mencapai 4,38 persen atau sebanyak 298 desa, kemudian disusul berturut turut campak dan malaria mencapai sekitar 2 persen desa atau lebih dari 150 desa.

Lebih lanjut apabila disimak Grafik 6.2, tampaknya daerah perkotaan yang mengalami wabah penyakit persentasenya lebih besar dibanding daerah pedesaan, bahkan untuk demam berdarah persentase daerah perkotaan yang mengalami wabah tersebut mencapai lebih dari tiga kali lipatunya. Hal ini tampaknya berkaitan erat dengan buruknya saluran sanitasi di daerah perkotaan, sehingga banyak air tergenang yang merupakan media pengembangbiakan nyamuk pembawa wabah demam berdarah, terutama pada musim hujan.





Kemudian apabila kita perhatikan Grafik 6.3, tampak banyaknya penduduk yang meninggal sebagai akibat wabah penyakit. Berdasarkan catatan di Desa yang dihimpun dalam Podes 2000 diketahui bahwa wabah yang paling banyak menyebabkan kematian adalah wabah muntaber yaitu mencapai 305 orang, selanjutnya akibat wabah demam berdarah mencapai 204 orang, akibat ISPA mencapai 97 orang, wabah malaria mencapai 82 orang, campak mencapai 38 orang dan akibat wabah-wabah penyakit lainnya mencapai 96 orang.

Pada umumnya wabah-wabah penyakit tersebut menyerang anak-anak. Kematian yang diakibatkannya, biasanya disebabkan keterlambatan dalam memberikan pertolongan, karena dianggap gangguan kesehatan yang tidak berbahaya. Hal ini terutama disebabkan kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membawa anak ke tenaga medis/ahlinya segera setelah timbulnya keluhan kesehatan, sehingga bisa diketahui secara dini penyakitnya dan dapat diberikan pertolongan yang tepat secepatnya.

Adapun untuk kasus busung lapar/HO/kekurangan gizi selama setahun terakhir, ternyata sebanyak 149 desa atau sekitar 1,76 persen desa menyatakan banyak balita didesanya yang mengalami kekurangan gizi dan sebanyak 1.167 desa atau sekitar 13,80 persen desa menyatakan terdapat beberapa kasus balita kurang gizi. Sedangkan untuk kasus kekurangan gizi diluar balita ternyata 48 desa atau 0,57 persen desa menyatakan terdapat banyak kasus kekurangan gizi tersebut dan sekitar 606 desa atau sekitar 7,17 persen menyatakan terdapat beberapa kasus. Masih cukup banyaknya desa yang penduduknya mengalami kasus kekurangan gizi ini diduga

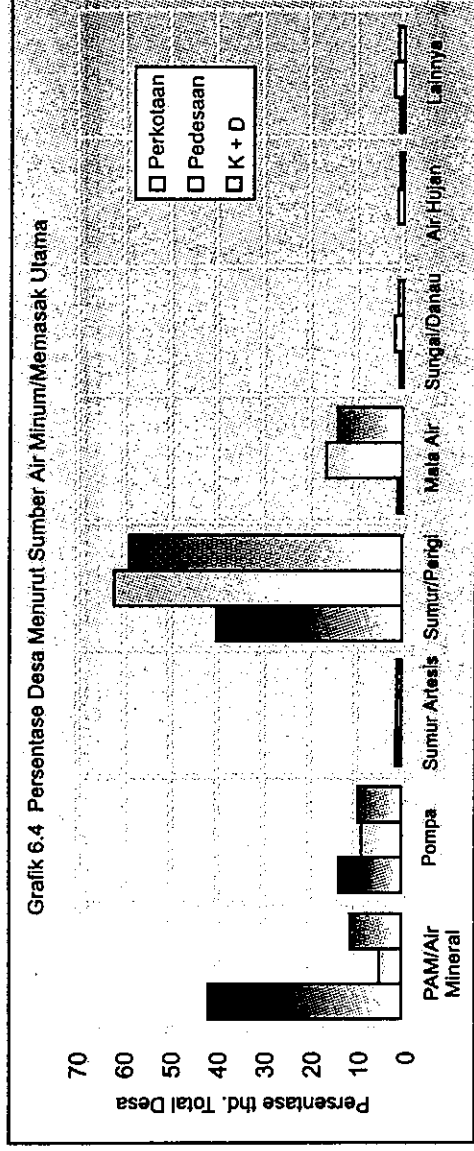
berkaitan erat dengan belum pulihnya kehidupan perekonomian penduduk, sehingga masih terdapat cukup banyak penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya yang paling mendasar yaitu keperluan akan makanan.

#### 6.4 Sumber Air untuk Minum/Memasak dan Mandi/Mencuci

Air yang bersih dan sehat sangat dibutuhkan oleh penduduk, terutama untuk keperluan minum/memasak. Air minum yang kotor, tercemar maupun kandungan mineralnya tidak seimbang, apalagi mengandung zat-zat beracun, sangat memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan bahkan bisa jadi menyebabkan kematian.

Berdasarkan data Podes 2000 sebagaimana tampak pada Grafik 6.4, diketahui bahwa lebih dari separuh desa yang ada di Jawa Timur (59,37 persen), sebagian besar air yang dipergunakan penduduk untuk minum/memasak bersumber dari air sumur, sekitar 14,13 persen bersumber dari mata air dan sekitar 11,15 persen bersumber dari air PAM/mineral. Yang masih cukup memprihatinkan terdapat sekitar 1,83 persen desa (151 desa) yang sebagian besar penduduknya menggunakan air sungai/danau untuk minum/memasak dan sekitar 0,61 persen (52 desa) menggunakan air hujan.

Air minum/memasak yang baik bersumber dari air mineral dan PAM. Namun demikian untuk air PAM terutama di kota-kota besar, seringkali dikeluarkan adanya air yang kotor dan tercemar. Tetapi secara umum apabila pengambilan bahan baku air dan pengolahannya dilaksanakan secara benar, sebenarnya air PAM merupakan sumber air yang baik disamping air mineral. Sedangkan penggunaan air sumur maupun pompa khususnya di daerah perkotaan yang sangat padat sebenarnya harus dihindari, karena jarak antar rumah yang sangat berhimpitan sulit untuk melakukan kontrol terhadap rembesan air limbah dan kotoran/tinja ke sumur penduduk. Air sumur/pompa layak digunakan apabila jarak sumur dengan lokasi pembuangan limbah/kotoran lebih dari 10 meter.



seketat air untuk keperluan minum/memasak, haruslah air yang bersih dan tidak tercemar, terutama untuk keperluan mandi. Hal ini dikarenakan air yang tercemar bisa menyebabkan gangguan kulit seperti gatal-gatal, kaki berair, alergi dan lain-lain.

Sebagaimana halnya air untuk keperluan minum/memasak, hampir 60 persen desa sebagian besar penduduknya menggunakan air sumur/perigi untuk mandi/mencuci. Sedangkan untuk penggunaan sumber air lainnya untuk keperluan mandi/mencuci komposisi juga mirip dengan air yang digunakan untuk minum/memasak, yaitu berturut-turut setelah sumur/perigi, disusul mata air, pompa dan sungai/danau.

# 7

## PERHUBUNGAN

Pengumpulan data perhubungan dalam Podes 2000 meliputi kegiatan angkutan dan komunikasi yang menghubungkan suatu desa ke ibukota kecamatan atau kota terdekat.

### 7.1 Angkutan

Angkutan merupakan kegiatan usaha yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor, baik melalui darat, air maupun udara.

h

Table 7.1 Banyaknya Desa Menurut Jenis Permukaan Jalan Terluas dan Status Desa

No.	Permukaan jalan terluas	Jumlah		% Terhadap Total Desa	
		K	D	K	D
1	Aspal/beton/Con Blok	1.156	3.471	91,53	48,25
2	Darat/teras	71	2.899	05,62	40,30
3	Tanah	35	794	02,77	11,04
4	Lainnya		30	00,08	00,42
	Jumlah	1.263	7.194	100	100
	Yang dapat dilalui kendaraan roda 4	1.258	6.986	89,60	97,11

Sumber: Podes 2000

Berdasarkan data Podes 2000 dapat diketahui bahwa permukaan jalan yang sudah diaspal/beton/con blok sebanyak 4.627 desa. Sementara masih ada sebanyak 829 desa atau sekitar 9,80 persen yang permukaan jalan terluas masih dari tanah. Menurut status desa dari 829 desa tersebut sebanyak 35 desa diantaranya berstatus perkotaan, dan sisanya sebanyak 794 desa berstatus pedesaan.

**Tabel 7.2 Banyaknya Desa yang Memiliki Jembatan Sungai yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda 4**

No	Jenis Jembatan	Jumlah		% (Terdapat Total Desa)	
		K	D	K	D
1	Besi/beton	1914	4.267	5.181	72,37
2	Besi/beton dan kayu/bambu	0	127	130	00,24
3	Kayu/bambu	51	699	730	02,45
					09,72
					08,63

Sumber: Podas 2000

Namun demikian dari sebanyak 8.436 desa yang ada di Jawa Timur, sebesar 97,48 persen diantaranya sudah dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4. Selanjutnya secara lebih rinci, jumlah desa yang memiliki jembatan sungai sebagai media penghubung antar desa atau dalam desa yang bersangkutan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4, sebanyak 5.181 desa atau 61,26 persen diantaranya terbuat dari konstruksi besi/beton, sebanyak 730 desa atau 8,63 persen dari kayu/bambu, dan hanya sebanyak 130 desa yang terbuat dari konstruksi besi/beton dan kayu/bambu.

## 7.2 Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti antara satu orang dengan orang lain, yang dalam Podas 2000 meliputi kegiatan telekomunikasi dan kegiatan pos dan giro.

Kelancaran hubungan antar penduduk dalam desa atau keluar desa, proses penyerapan informasi dan hiburan adalah sangat tergantung seberapa banyak ketersediaan prasarana komunikasi yang dimiliki oleh desa setempat.

Dari Tabel 7.3 tersebut dapat dilihat bahwa hanya sekitar 7,58 persen desa yang memiliki sarana kantor pos/kantor pos pembantu. Bila dilihat dari perimbangannya, nampak bahwa jumlah desa yang memiliki prasarana tersebut hampir berimbang antara daerah perkotaan dan pedesaan.

**Tabel 7.3 Banyaknya Desa yang Memiliki Prasarana Komunikasi Menurut Jenis Prasarana Komunikasi dan Status Desa**

No.	Jenis Prasarana Komunikasi	Jumlah (Desa)			% Desa (Jawa Timur)		
		K	D	K+D	K	D	K+D
1	Kantor pos/kantor pos pembantu	205	338	641	24,15	41,07	47,63
2	Pos Keilling	470	1.892	2.360	57,23	43,72	50,97
3	Televisi umum	207	636	843	26,69	13,74	20,43
4	Pelangan surat kabar	1.228	1.646	2.874	37,07	34,53	35,75
5	Telepon umum/koin	1.031	1.083	2.100	31,68	17,06	24,33
6	Telepon umum/kantel	527	161	688	21,73	12,11	16,03
7	Watel/korpon	1.103	2.041	3.144	37,33	23,76	31,33
8	Warpostal/warpap/postel	202	103	305	12,36	11,57	14,52

Sumber: Podes 2000

Sementara desa yang tidak memiliki prasarana kantor pos/kantor pos pembantu, jika dilihat dari jarak terdekat untuk mencapai prasarana tersebut nampak bahwa sebagian besar desa berjarak antara 3 – 5 kilometer dari kantor desa. Desa dengan jarak paling jauh yaitu lebih dari 25 kilometer mencapai 84 desa, 2 desa diantaranya adalah daerah perkotaan.

**Tabel 7.4 Banyaknya Desa yang Tidak Memiliki Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu Menurut Jarak Ke Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu dan Status Desa**

No.	Jarak ke kantor pos/kantor pos pembantu	Jumlah (Desa)			% Desa (Jawa Timur)		
		K	D	K+D	K	D	K+D
1	<3	667	1.333	2.000	52,63	19,25	31,50
2	3-5	238	2.742	2.980	19,64	37,70	33,00
3	6-9	36	1.716	1.752	12,77	23,31	20,67
4	10-14	6	603	609	10,43	13,9	17,20
5	15-19	2	272	274	10,00	13,74	16,24
6	20-24	1	83	84	10,00	11,22	11,01
7	25+	2	82	84	10,16	11,17	10,99

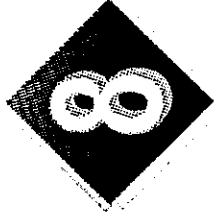
Sumber: Podes 2000

Dari sisi penyerapan informasi nampak bahwa mayoritas penduduk Jawa Timur sudah menikmati informasi melalui surat kabar, yaitu jumlahnya mencapai 5.872 desa. Dari jumlah ini nampak bahwa desa perkotaan mencapai 97,07 persen dari total desa perkotaan dan desa pedesaan mencapai 64,58 persen terhadap total desa pedesaan.

Aktivitas untuk melakukan pengiriman berita melalui wartel/kiospon sudah banyak dilakukan penduduk. Melalui data Podes 2000 dapat dilihat bahwa jumlah desa yang memiliki wartel/kiospon mencapai 3.244 desa. Jumlah ini sudah mencapai 38,36 persen dari total desa di Jawa Timur.

<https://jatim.bps.go.id>





# EKONOMI

Keberadaan fasilitas ekonomi yang ada dalam suatu desa/kelurahan akan turut menentukan perputaran roda perekonomian desa, dan selanjutnya akan sangat menentukan tingkat kesejahteraan penduduk suatu desa/kelurahan.

## 8.1 Sarana Produksi Pemasaran

Hal pertama yang menentukan arus perputaran ekonomi adalah menyangkut adanya kelompok pertokoan (minimal ada 10 toko dan harus mengelompok). Menurut data Podes 2000, terdapat 1.435 desa yang mempunyai kelompok pertokoan, dengan jumlah yang hampir sama antara pedesaan dan perkotaannya.

REKAPITULASI DATA DESA YANG MELAKUKAKAN PRODUKSI, PEMASARAN DAN PERSEWAAN MELAKUKAKAN PRODUKSI

No	Jenis Desa	Sarana Desa			% Timadap Total Desa		
		P	KSD	K	10	KSD	
1	Kelompok Pertokoan	719	1.435	56,93	09,95	16,97	
2	Pasar	705	2.789	62,15	27,86	32,98	
3	Sarana Usaha Kecil	215	244	17,34	00,35	02,89	
4	Perdagangan di perkotaan	1.125	5.933	69,07	66,83	70,15	
5	Pertokoan pedesaan	89	155	03,09	01,61	01,83	
6	Hotel/penginapan	217	343	84,80	57,34	61,44	
7	Pusat wisata/pasar	1.071	5.196	84,80	57,34	61,44	

Sumber: Podes 2000



Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Berdasarkan Tabel 8.1 dapat dilihat bahwa jumlah desa yang mempunyai pasar dengan bangunan permanen/tanpa bangunan permanen sebanyak 2.789 desa, atau sekitar 32,98 persen dari total desa di Jawa Timur.

Supermarket/pasar swalayan/toserba merupakan pasar yang menjual beraneka barang dengan harga yang telah ditentukan, dan konsumen/pembeli melayani diri sendiri untuk dibayar di tempat kasir. Cara ini dipandang sedikit lebih maju dibanding dengan kelompok pertokoan, jika dilihat dari sisi tempat dan ragam barang yang tersedia. Dari sebanyak 244 desa yang mempunyai supermarket/pasar swalayan/toserba, ternyata sebagian besar yaitu 219 desa diantaranya adalah berada di desa perkotaan.

Rumah makan merupakan kegiatan usaha yang menyediakan/menjual makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Sedangkan warung/kedai menjual bermacam-macam makanan kecil dan minuman yang siap dikonsumsi yang dijual di tempat tetap termasuk kantin. Dari Tabel 8.1 dapat dilihat bahwa jumlah restoran/rumah makan/kedai/warung terdapat pada sebagian besar desa di Jawa Timur yang mencapai 5.933 desa atau sekitar 70,15 persen dari total desa.

Prospek yang semakin bagus untuk usaha persewaan alat pesta menyebabkan jumlah desa yang memiliki persewaan alat pesta jumlahnya mencapai dua per tiga lebih dari jumlah desa di Jawa Timur, atau sebanyak 5.196 desa.

## 8.2 Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga (IKKR)

Kegiatan dalam bidang industri meliputi kegiatan merubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk mendapatkan nilai tambah (*value added*). Yang termasuk dalam IKKR antara lain: kerajinan dari kulit, kerajinan dari kayu/bambu, kerajinan dari logam dan kerajinan dari logam mulia.

Jumlah desa yang mempunyai kerajinan dari kulit mencapai 3,75 persen dari total desa Jawa Timur. Desa yang memiliki kerajinan dari kayu/bambu/rotan jumlahnya paling banyak dan mencapai 4.128 desa atau sekitar 48,81 total desa.

Tabel 8.2. Banyaknya Desa Yang Memiliki Industri Kerajinan Rakya Menurut Jenis Industri dan Status Desa

No	Jenis Industri	Status		% Jumlah Total Desa			
		K	D	K+D	K	D	K+D
1	Kerajinan dari kulit	152	165	317	12,03	12,29	12,16
2	Kerajinan dari kayu/bambu/rotan	643	3.430	4.073	51,31	43,87	48,61
3	Logam	220	483	703	17,42	16,44	16,93
4	Logam mulia	118	86	204	9,34	11,33	10,53

Sumber: Podas 2000

### 8.3 Perbankan

Perputaran keuangan diantaranya dapat diketahui melalui jumlah bank yang ada, karena bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank akan didirikan melalui suatu proses studi kelayakan sebelumnya, yang mendukung pada suatu kesimpulan bahwa bank

Tabel 8.3. Banyaknya Desa Yang Memiliki Bank/BPR Menurut Jenis Bank dan Status Desa

No	Jenis Bank	Status		% Jumlah Total Desa			
		K	D	K+D	K	D	K+D
1	Bank Umum	466	317	783	35,82	34,41	35,25
2	BPR	510	1093	1603	40,86	15,26	19,08

Sumber: Podas 2000

campuran baik yang masuk kategori dvisa maupun non dvisa. Jumlah desa yang memiliki bank umum mencapai 782 desa. Desa perkotaan mencapai 465 desa dan desa pedesaan mencapai 317 desa.

BPR menerima simpanan hanya dalam deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya, selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Dari Tabel 8.3 dapat dilihat bahwa jumlah BPR hampir dua kali dari bank umum, yaitu sebanyak 1.614 desa.

#### 8.4 Koperasi

Dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip, keanggotaannya sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarakan atas asas kekeluargaan

Table 8.4: Banyaknya Desa Yang Memiliki Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Status Desa

No	Jenis Koperasi	Status			% Terhadap Total Desa		
		K	D	K+D	K	D	K+D
1	KUD	246	745	991	19,48	10,36	11,72
2	Kopinkra	63	87	150	04,99	01,24	01,77
3	Koperasi simpan pinjam	525	116,93	21638	65,32	25,20	31,19
4	Koperasi pondok pesantren	183	393	576	14,49	5,46	6,81
5	Koperasi tahu tempe	37	50	87	2,93	0,70	1,03
6	Koperasi non KUD lainnya	550	1.050	1.610	45,55	14,73	19,04

Sumber: Poddes 2000

Dari jenis-jenis koperasi yang ada ternyata koperasi simpan pinjam menempati peringkat pertama dengan jumlah sebanyak 2.638 desa atau sekitar sepertiga dari total desa. Selanjutnya koperasi non KUD lainnya (koperasi pemasaran, konsumen dan jasa-jasa) berada pada urutan kedua dengan jumlah sebanyak 1.610 desa, dan pada posisi juru kunci ditempati oleh koperasi tahu tempe yang hanya 87 desa yang memilikinya.

### 8.5 Keadaan Ekonomi Secara Umum

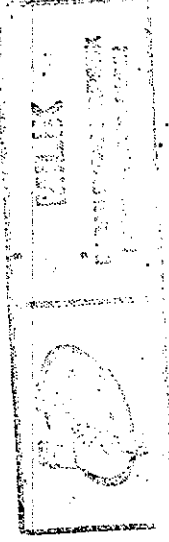
Keadaan sosial ekonomi masyarakat adalah didasarkan pada persepsi yang bersifat subyektif dari aparat desa/kelurahan. Persepsi didasarkan pada keadaan pasca krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sekitar pertengahan tahun 1997. Ada lima jenis keadaan sosial ekonomi masyarakat, yaitu sangat kaya, kaya, cukup, miskin dan sangat miskin.

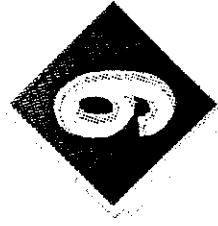
Tabel 8.6. Banyaknya Desa Menurut Keadaan Ekonomi dan Status Desa

No	Keadaan Ekonomi Penduduk Secara Umum	Status			% Temasuk Total Desa		
		K	D	K+D	K	D	K+D
1	Sangat kaya	3	5	9	0,24	0,08	0,11
2	Kaya	93	127	190	7,36	1,35	2,25
3	Cukup	1138	2.636	6.924	90,10	79,04	89,69
4	Miskin	28	1376	1704	2,22	13,13	16,60
5	Sangat Miskin	1	23	30	0,08	0,10	0,35

Sumber: Potres 2000

Secara umum menurut persepsi aparat desa/kelurahan, lebih dari 80 persen keadaan sosial ekonomi penduduk dinyatakan pada posisi cukup, sebesar 16,60 persen miskin dan sebesar 2,25 persen kaya. Sementara sangat miskin mencapai 0,35 persen dan sangat kaya hanya 0,11 persen dari total desa/kelurahan yang ada.





# KEAMANAN

Faktor keamanan sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha dan investasi. Bila suatu daerah relatif tidak aman, ada kecenderungan para investor akan berpikir berkali-kali untuk memutuskan menanam investasi pada daerah tersebut.

Menurut data Podes 2000, banyaknya desa yang masyarakatnya terkena tindak kejahatan yang terjadi setahun terakhir menunjukkan bahwa kasus pencurian merupakan kasus terbanyak yang dialami oleh sebagian besar desa di Jawa Timur, yaitu mencapai 54,33 persen dari total desa.

No	Jenis Kejahatan	Stasiun			% Tempaan Total Desa		
		K	D	K+D	K	D	K+D
1.	Pencurian	143	3752	4159	66,75	52,15	54,33
2.	Perampokan	69	259	325	5,46	3,56	3,84
3.	Perampasan	42	210	260	3,33	3,03	3,07
4.	Pembunuhan	55	247	302	4,35	3,43	3,57
5.	Penganiayaan	75	243	318	5,94	3,36	3,76
6.	Perkelahian macam	49	119	159	3,17	1,65	1,88
7.	Pembakaran	17	95	112	1,35	1,32	1,32
8.	Bunuh diri	35	148	183	2,77	2,06	2,16
9.	Lainnya	47	183	230	3,72	2,54	2,72

Sumber: Podes 2000

Kejadian yang sering dialami oleh kebanyakan desa/kelurahan adalah perampokan, penjarahan, pembunuhan dan penganiayaan yang mencapai diatas 3 persen terhadap total desa.

Kasus kejahatan berikutnya yang juga banyak dialami masyarakat adalah bunuh diri dan lainnya, yang mencapai diatas 2 persen dari total desa. Selanjutnya yang sempat menjadi kekuatan masyarakat adalah menyangkut perkelahian masal, baik menyangkut perkelahian antar pelajar maupun perkelahian antar desa/kampung, serta pembakaran, yang mencapai diatas 1 persen dari seluruh desa.

Kasus kejahatan yang umum terjadi adalah pada satu kali kasus didalamnya terdapat banyak kejadian kejahatan, seperti pada kasus pencurian yang diikuti dengan kasus penganiayaan dan bahkan pembunuhan.

<https://jatim.bps.go.id>



# P E N U T U P

Berdasarkan hasil survei Podes 2000 dapat diketahui kondisi desa di Jawa Timur khususnya mengenai keberadaan fasilitas baik pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan lainnya. Beberapa hal yang telah dikemukakan pada Bab 1 hingga Bab 9, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- Jumlah penduduk Jawa Timur hasil pencacahan Podes sebesar 33.794.326 orang dengan tingkat kepadatan 934,56 orang/km<sup>2</sup>. Dari sejumlah itu sebanyak 58,96 persen penduduk tinggal di pedesaan.
- Di Jawa Timur terdapat 215.809 buah industri yang terdiri dari 670 buah industri penyamakan kulit, 53012 buah industri pengolahan makanan, 44.582 industri pembakaran batu bata, 2.177 buah industri batik dan 115.368 buah industri lainnya. Seluruh industri tersebut tersebar di 6.898 desa.
- Data perumahan yang dicakup dalam pencacahan Podes 2000 adalah informasi mengenai banyaknya bangunan rumah menurut kualitas bangunan. Tercatat sebanyak 8.108.472 buah yang terdiri dari 66,25 persen bangunan permanen dan 33,75 persen bangunan bukan permanen.
- Untuk mengatasi masalah perumahan yang ada di Jawa Timur, telah dibangun perumahan oleh developer/pengembang menurut type bangunan sbb : 27,55 persen adalah type RSS; 45,96 persen type RS; 23,24 persen type menengah dan 3,25 persen type mewah.
- Fasilitas pendidikan yang telah dibangun di sebagian besar desa di Jawa Timur adalah sekolah TK dan SD. Sedangkan jenis sekolah lainnya seperti masih menyebar di sebagian kecil desa-desa di Jawa Timur. Tercatat sebanyak 7.071 desa di Jawa Timur memiliki bangunan/sekolah TK, 8.393 desa memiliki bangunan/sekolah SD, 3.330 desa memiliki bangunan/sekolah SLTP, 1.438 desa memiliki bangunan/sekolah SMU dan 217 desa memiliki bangunan/sekolah Akademi/PT.

- Perhatian Pemerintah di bidang pendidikan, selain diwujudkan dalam bentuk fasilitas juga dalam bentuk bantuan yang disalurkan melalui program GNOTA dan JPS. Di Jawa Timur terdapat 134.073 anak mendapat bantuan pendidikan yang berasal dari program GNOTA dan 422.700 anak mendapat bantuan pendidikan dari program JPS.
- Kegiatan/ institusi sosial kemasyarakatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di sebagian besar desa adalah kegiatan PKK yaitu sebanyak 8.370 desa.
- Sarana kesehatan yang paling banyak tersedia di sebagian besar desa adalah Posyandu, dimana rata-rata setiap desa memiliki 4 buah posyandu. Sedangkan untuk jenis lainnya masih relatif jarang dimiliki oleh setiap desa.
- Tenaga kesehatan yang hampir ada di semua desa adalah tenaga non medis seperti tukang pijat dan dukun bayi terlatih. Sedangkan tenaga kesehatan medis yang terbanyak adalah bidan di desa (BDD).
- Sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya berasal dari sumur, yaitu sebanyak 59,37 persen desa. Sedangkan untuk jenis mata air dan PAM masing-masing sebanyak 14,13 persen desa dan 11,15 persen desa.
- Di bidang perhubungan, tercatat bahwa sebagian besar permukaan jalan di desa sudah diaspal yaitu sebanyak 4.627 desa. Sedangkan untuk jenis permukaan jalan tanah dan lainnya hanya terdapat pada 860 desa di Jawa Timur.
- Dari sisi penyerapan informasi nampak bahwa mayoritas penduduk Jawa Timur sudah menikmati informasi melalui surat kabar, yaitu mencapai 5.872 desa. Dimana sebagian besar merupakan masyarakat yang tinggal di perkotaan.
- Jenis sarana produksi pemasaran yang terbanyak dimiliki adalah restoran/umah makan/kedai yaitu mencapai 5.933 desa. Sedangkan sarana produksi yang masih jarang dimiliki adalah pangkalan pendaratan ikan (155 desa), supermarket (244 desa) dan hotel/penginapan (343 desa).
- Jenis kegiatan ekonomi seperti industri kecil/kerajinan rakyat, perbankan dan koperasi sudah mulai tersebar disebagian besar pedesaan. Hal ini tentunya sangat menunjang roda perekonomian di daerah khususnya di pedesaan.
- Berdasarkan penilaian/persepsi kepala desa mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat dinyatakan bahwa 80 persen masyarakatnya termasuk kategori cukup.



